

ABSTRAK

Fenomena permukiman kumuh di daerah aglomerasi perkotaan terjadi akibat padatnya jumlah penduduk serta tidak diimbangi dengan penataan tanah yang tertib dan teratur. Seperti halnya di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah aglomerasi perkotaan karena berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta. Bentuk bidang tanah yang belum tertata berpotensi menjadi kawasan yang tidak teratur dan cenderung kumuh. Upaya penataan tanah melalui program konsolidasi tanah menjadi upaya yang paling bijak untuk dilaksanakan di Desa Sinduadi. Pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Sinduadi berlangsung sejak tahun 1989 hingga 2014 dibagi dalam 3 Periode. Periode I berlangsung pada tahun (1989-2003), Periode II (2004-2008), dan Periode III (2009-2014). Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Sinduadi ditemukan berbagai masalah serta hambatan yang menyebabkan pelaksanaan konsolidasi tanah berlangsung hingga 2 dekade lebih. Tujuan dari Penulisan hukum ini untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Sinduadi apabila dihubungkan dengan Asas Penatagunaan Tanah yang tercantum dalam PP No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, serta mengetahui manfaat yang didapatkan setelah pelaksanaan konsolidasi tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mengkaji bahan pustaka dilengkapi dengan data lapangan untuk kemudian menghubungkan kesesuaian dengan Asas Penatagunaan Tanah. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, pelaksanaan konsolidasi tanah sudah terselesaikan namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan beberapa asas dalam Asas Penatagunaan Tanah.

Kata Kunci:Konsolidasi tanah, Asas Penatagunaan Tanah, Desa Sinduadi